



Penerapan *Green Economy* pada PT CP: Pembalikan Paradigma dari Ekonomi Eksploitatif ke Ekonomi Konservasi Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Urbanus Ura Weruin

Program Studi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

e-mail: urbanusw@fe.untar.ac.id

Abstrak

Ekonomi hijau pada dasarnya merupakan paradigma pembangunan yang menggeser orientasi ekonomi dari eksploitasi sumber daya menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam pendekatan ini, kegiatan produksi dan konsumsi tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip ekonomi hijau mencakup efisiensi energi dan sumber daya, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penggunaan energi terbarukan, serta penerapan pola hidup rendah emisi. Selain itu, ekonomi hijau mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat. Bagi PT CP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan konsumsi gula, penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting karena aktivitas bisnisnya berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Melalui kegiatan PKM ini, kesadaran ekologis perusahaan berhasil ditingkatkan sehingga aspek keberlanjutan semakin diperhatikan dalam proses produksi dan konsumsi.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau, Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.*

Abstract

The green economy represents a shift from a resource-exploitation approach toward a resource-conservation paradigm that balances economic growth with environmental sustainability. Rather than focusing solely on profit and production expansion, this concept emphasizes the need to consider the long-term impacts of economic activities on natural resources and human well-being. Its key principles include efficient resource and energy use, poverty reduction, social equity, renewable energy adoption, low-carbon development, and sustainable consumption and production patterns. The green economy also promotes improved environmental data management and greater awareness of ecological limits. Ultimately, it seeks to enhance quality of life while ensuring the fair distribution of prosperity and the protection of resources for future generations. As a PKM partner operating in the sugar industry, PT CP is closely connected to natural resource utilization and environmental impacts. This program successfully increased the company's ecological awareness and strengthened its commitment to integrating sustainability into business operations and decision-making processes.

Kata Kunci: *Green Economy, Environment, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu, kami melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersama PT CP dengan tema “Penerapan *Green Accounting* dalam Perusahaan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan bersama PT CP”. Tema yang spesifik ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Laporan PKM tersebut sudah dipublikasikan dalam *Abdira*, sebuah jurnal ilmiah yang khusus mempublikasikan kegiatan PKM. Tetapi masih terdapat gagasan-gagasan penting dan relevan yang belum dipublikasikan tentang tema yang lebih besar dan menyeluruh yakni *green economy* atau ekonomi hijau. “Akuntansi hijau” merupakan bagian dari ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan perwujudan dari visi dan praktik ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*). Artikel ini merupakan bagian dari upaya membagikan beberapa konsep penting dari PKM tersebut untuk mengingatkan berbagai pihak tentang pentingnya mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui *green economy* sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Makmun, 2025).

Kajian literatur-teoretis yang dilakukan oleh beberapa pihak menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tak lagi bertumpuh pada pertumbuhan ekonomi yang eksklusif melainkan pengembangan ekonomi yang inklusif, yakni kebijakan dan praktik ekonomi yang secara nyata meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru; mengatasi pengangguran; mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi; dan penggunaan sumber daya yang efisien (Judijanto & Al-Amin, 2025; Jubaedah dkk. 2022; Siregar, dkk. 2026). Degradasi sumber daya alam dan sumber daya energi, memperburuk lingkungan dan kualitas hidup manusia, karena tidak hanya ketersediaan sumber daya alam menipis melainkan juga memicu perubahan iklim dan pemanasan global. Semua ini tidak hanya mengancam ekosistem lingkungan melainkan juga keberlangsungan hidup manusia (Jubaedah dkk., 2022).

Triandini dkk. (2025) mencatat bahwa telah dilakukan banyak studi tentang fokus dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menerapkan ekonomi hijau. Selain makna ekonomi hijau sendiri sangat luas, implementasinya pun sangat beragam. Terjadi peningkatan signifikan publikasi tentang ekonomi hijau. Bahkan tema pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mencakup ekonomi hijau menjadi salah satu inti penelitian dan publikasi saat ini.

Pelatihan Jubaedah, dkk. (2022) yang membekali para siswa dengan materi tentang ekonomi hijau terbukti meningkatkan kesadaran ekologis para siswa. Aghnia (2026) melaporkan bahwa integrasi pendidikan lingkungan dengan ekonomi hijau dapat membentuk generasi peduli bumi. Pendidikan dan pembelajaran ekonomi hijau mampu menumbuhkan kesadaran ekologis peserta didik sejak dini dalam bentuk menjaga kelestarian alam. Siregar dkk., (2026) melaporkan bahwa kesadaran masyarakat atas kelestarian sumber daya alam laut, darat, dan udara masih rendah. Kegiatan pemberdayaan *green economy* dan *blue*

economy berbasis masyarakat lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan penyuluhan partisipatif dan *Focus Group Discussion* (FGD) terbukti meningkatkan kesadaran ekologis.

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi hijau, menurut Makmun (2025), merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau. Makmun (2025) melaporkan bahwa dalam rangka memerangi perubahan iklim dan menstimulasi pembangunan berkelanjutan, Bappenas telah meluncurkan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) yang menekankan sembilan sektor yakni kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan untuk bebenah diri mendukung pembangunan berkelanjutan. Kementerian Keuangan misalnya telah mengimplekmentasikan ekonomi hijau melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan penerapannya seperti *green budgeting*, yang diterjemahkan dalam empat program aksi: kebijakan fiskal yang mendukung aksi mencegah perubahan iklim dan investasi; memitigasi dan meninjau ulang prioritas instrumen fiskal dan investasi spesifik yang ramah iklim; menjajaki cara untuk meningkatkan pendanaan karbon domestik; dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengembangkan instrumen pembiayaan domestik (Makmun, 2025). Lebih khusus lagi, dijelaskan bahwa kebijakan fiskal yang dimaksud adalah: a. kebijakan untuk mendorong energi panas bumi dan energi terbarukan; b. kebijakan untuk memperbaiki hasil hutan dan mengakses pasar karbon REDD; 3. Kebijakan fiskal dan isu pendapatan di sektor kehutanan; d. Mekanisme insentif kehutanan daerah.

Berdasarkan studi literer dan praktik PKM yang sudah dilakukan serta kebutuhan mitra, kami melakukan kegiatan PKM bersama mitra PKM yakni PT Crown Pratama (CP). Mitra PKM bergerak dalam produksi gula kemasan. Rantai produksi dan konsumen PT CP berhubungan dengan produk makanan yang berasal dari pertanian, diolah menjadi gula, dan kemudian didistribusikan kepada para konsumen. Proses produksi dan konsumsi produk yang memenuhi tuntutan ekonomi hijau menjadi tujuan dari pelatihan tersebut.

METODE

PKM "Penerapan *Green Economy* pada PT CP: Pembalikan Paradigma dari Ekonomi Eksploitatif ke Ekonomi Konservasi Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" dilakukan melalui beberapa tahap: mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Tahap persiapan dimulai dengan membangun komunikasi dengan mitra, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mitra untuk kemudian merumuskan proposal PKM guna mencari solusi atas permasalahan yang dialami mitra. Mitra menyadari bahwa proses produksi dan konsumsi produk gula yang dihasilkan mesti memenuhi nilai dan program ekonomi hijau sebagai penerapan program pembangunan berkelanjutan. Itulah sebabnya PKM ini dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dikelola bersama mitra. Dimulai dengan pengantar oleh pimpinan PT CP, pemaparan materi PKM, dan tanya jawab. Pada bagian evaluasi pelaksanaan PKM para peserta diminta menulis evaluasi dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang praktik

PKM untuk kemudian memastikan apakah PKM ini berhasil meyakinkan para peserta tentang pentingnya pengembangan ekonomi hijau bagi perusahaan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kemudian dikuantifikasi untuk menentukan tingkat keberhasilan PKM. Pelaksanaan PKM "Penerapan *Green Economy* pada PT CP: Pembalikan Paradigma Dari Ekonomi Eksploitatif ke Ekonomi Konservasi Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" tersebut menggunakan beberapa metode sekaligus yakni pemaparan materi PKM dalam bentuk ceramah; disusul dengan *sharing* pengalaman; tanya jawab; dan diskusi dialogis-interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dibuka oleh pimpinan PT CP, kegiatan PKM ini disusul dengan pemaparan materi PKM yang terdiri dari: 1) Pengertian *green economy*; 2) Tujuan *green economy*; 3) Relevansi *green economy* bagi perusahaan; 4) Prinsip-prinsip pokok *green economy*; dan 5) nilai-nilai pokok *green economy* serta hubungan *green economy* dengan pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah isi ringkas materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut .

Pengertian Ekonomi Hijau

Triandini dkk. (2025) menyatakan bahwa pengertian ekonomi hijau tidak hanya luas dan beragam melainkan juga ambigu dan memicu perselisihan. Para ekonom pun sering tidak sepakat tentang esensi "ekonomi hijau,". Beberapa ekonom bahkan menunjukkan kekurangan konseptual gagasan tersebut. Istilah ekonomi hijau sering dianggap lebih sebagai isu politik dari pada praktik tata kelola ekonomi.

David Pearce merupakan salah satu tokoh kunci dibalik gagasan tentang ekonomi hijau. Melalui buku *Blueprint Green Economy; Blueprint 2: Greening the World Economy* (1991) dan *Blueprint 3: Measuring Sustainable Development* (1994), Pearce menunjukkan dasar teoritis ekonomi hijau. Jacobs melalui buku *The Green Economy* (1991) juga menjelaskan makna ekonomi hijau. Problem-problem lingkungan alam dan sosial seperti perubahan iklim, penipisan ozon, deforestasi tropis, dan degradasi sumber daya alam merupakan krisis lingkungan yang perlu disikapi melalui kebijakan ekonomi hijau. Setelah relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur ilmiah pada dekade 1990-an hingga awal 2000-an, konsep ekonomi hijau kembali memperoleh momentum global sekitar tahun 2008, terutama sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan meningkatnya ancaman perubahan iklim. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dari sumber daya alam sebagai aset pembangunan jangka panjang. Selain itu, ekonomi hijau mendorong investasi pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan (UNEP, 2011). Prinsip tersebut juga menempatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi sebagai fondasi utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Barbier, 2010; Pearce et al., 1989).

Seiring perkembangannya, ruang lingkup penerapan ekonomi hijau menjadi semakin luas dan mencakup berbagai sektor, seperti energi, transportasi,

pertanian, industri, hingga pengelolaan limbah. Ekonomi hijau juga mendorong perubahan pola konsumsi dan produksi menuju gaya hidup rendah karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil (OECD, 2011). Transformasi ini dipandang sebagai strategi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus menciptakan peluang kerja baru yang ramah lingkungan (World Bank, 2012). Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan lingkungan, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian ekosistem (UNEP, 2011; Barbier, 2010; OECD, 2011). Tujuannya tidak hanya untuk melestarikan sumber daya alam melainkan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan mempromosikan kesetaraan sosial melalui "stimulus hijau".

Pertemuan tingkat tinggi Rio 1992 dan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan tahun 2012 menjadi tonggak penting penerapan ekonomi hijau. Program PBB untuk lingkungan (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai "the process of reconfiguring business and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economy capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities". UNEP kemudian memperluas lingkup ekonomi hijau tidak hanya bertumpuh pada masalah lingkungan melainkan juga menekankan *improved human wellbeing, social equity, resource efficient, and socially inclusive*". Sejak saat itu, beberapa organisasi internasional, terutama UNEP (*The United Nations Environment Programm*) mengusulkan agar kegiatan lingkungan dan aksi mitigasi krisis iklim lebih mendukung sektor keuangan serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Istilah '*Green economy*' dalam komunitas akademik dapat ditelusuri dalam buku *Blueprint for a Green Economy*, karya David Pearce (Khikmatova, 2025). Sebagaimana diuraikan dalam buku ini, ekonomi hijau tidak lain dari upaya meninjau ulang sistem harga dengan memasukan komponen lingkungan, alokasi sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, dan memperhitungkan dampak degradasi lingkungan yang muncul dari kegiatan ekonomi. Aset lingkungan dan jasa hanya dipandangan sebagai sumber daya produksi. Akibatnya sektor-sektor tertentu ditekankan berlebihan sementara yang lain disingkirkan. Penggunaan sumber daya alam menjadi tidak hanya tidak efisien melainkan juga mengancam kepunahannya. Lingkungan hidup semakin terdegradasi. Kebijakan *payments for environmental pollution* bagi industri sering tidak terkontrol dari berbagai pihak yang bertanggungjawab. Ini tentu menjadi beban bagi kehidupan seluruh masyarakat.

Khikmatova (2025) melakukan analisis terhadap makna dan esensi ekonomi hijau. S.N.Khashinova, sebagaimana dilaporkan Khikmatova (2025) merumuskan ekonomi hijau sebagai *future economy in a new model based on the development of production and service sectors based on new knowledge and resource-saving technologies, while preserving the ecology of our planet*. Amartya Sen

merumuskan ekonomi hijau sebagai bukan sekadar pendekatan teknologis melainkan sebuah faktor penting dalam *developing human potentials*. B. Richard secara lebih spesifik merumuskan ekonomi hijau sebagai *an economic model that not only reduces the environmental impact of production and consumption, but also creates a good relationship between economic growth and environmental well-being* (Khikmatova, 2025)

Khikmatova (2025) menyatakan bahwa kondisi pembangunan ekonomi dalam abad 21 di negara-negara di dunia berhadapan dengan tantangan, persoalan, dan krisis lingkungan dalam berbagai skala. Khikmatova menulis, *"Today, almost all countries encounter environmental problems, which are further aggravated by factors such as global climate change, air and water pollution, waste management difficulties, and the scarcity of natural resources"* (Khikmatova, 2025). Guna mengatasi persoalan ini dibutuhkan manajemen lingkungan yang efektif. Bersamaan dengan itu, muncul dan berkembanglah *green economy* yang menekankan pendekatan ekonomi berkelanjutan. Banyak negara kemudian menyelidiki secara lebih mendalam dan menerapkan apa yang dikenal sebagai *'Green economy'*. Tujuannya jelas yakni, di satu sisi ekonomi hijau mempromosikan pertumbuhan ekonomi tetapi di sisi yang lain menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan (Khikmatova, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap 11.301 artikel terideks scopus terhadap fragmentasi definisi ekonomi hijau, Triadini dkk. (2025) menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap ekonomi hijau:

1. Bukan sebuah gagasan baru melainkan sebuah perjalanan perdebatan dan praktik yang panjang. Sudah sejak 1989 melalui karya Pearce dkk. (1989) dan Jacobs (1991) ekonomi hijau mendapat perhatian serius. Gagasan dan perdebatannya pun masih terus berlangsung sampai hari ini.
2. Bukan sekadar sebuah gagasan filosofis tentang kelestarian lingkungan melainkan juga aktivitas ekonomi yang melestarikan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan publik, dan menjaga kesetaraan dan keadilan sosial di dalam dan antar generasi.
3. Secara praktis, ekonomi hijau menuntut kerangka kerja, indikator standard, serta evaluasi terukur bagi para pembuat kebijakan guna menerapkan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, prinsip-prinsip ekonomi hijau adalah mengakui nilai dan investasi sumber daya alam; mengurangi kemiskinan; meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial; mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi; meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi; mendorong pola hidup rendah emisi dan berkelanjutan, bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam; memperbaiki dan menampilkan data lingkungan yang lebih akurat dan cepat.

Tetapi semua definisi ekonomi hijau menekankan keterkaitan antara ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Sebuah model ekonomi yang bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuntungan melainkan juga perlindungan lingkungan alam dan sosial.

Ekonomi Hijau dan Pertumbuhan Hijau

Adamowicz (2022) menyatakan bahwa ekonomi hijau merupakan fenomena baru dalam sejarah pembangunan sosio-ekonomi kontemporer. Kadang-kadang istilah ekonomi hijau (*green economy*) sinonim dengan pertumbuhan hijau (*green growth*), yaitu *the principles of implementing green economy, and the implementation of green transformation processes*. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan ekonomi hijau adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Triandini dkk. (2025) menegaskan bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek melahirkan problem lingkungan dan mengancam pembangunan berkelanjutan. Jauh lebih mendasar dari persoalan ini adalah bahwa pemahaman terhadap ekonomi hijau tidak selalu sistematis, kabur, dan tidak utuh alias fragmentaris.

Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Dalam praktik, ekonomi hijau didefinisikan sebagai praktik ekonomi yang mengedepankan rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial, yang sering dipandang sebagai jalan menuju pembangunan berkelanjutan. Itulah sebabnya mengapa istilah ekonomi hijau sering sinonim dengan ekonomi rendah karbon, ekonomi ekologis, pertumbuhan hijau, atau bahkan ekonomi berkelanjutan.

Dalam praktik, ekonomi hijau mempromosikan transisi energi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan, dari pertanian ekstensif ke pertanian intensif; dari ekonomi penggundulan hutan ke ekonomi yang menjaga kesehatan ekologis; dari ekonomi yang menguras sumber daya alam dalam jangka pendek ke pemanfaatan sumber daya lama yang efisien dan efektif. Singkatnya, ekonomi hijau merupakan model ekonomi yang memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup serta kesehatan dan kesetaraan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih kecil, ekonomi hijau mempromosikan proses produksi yang bersih serta konsumsi yang ramah lingkungan.

Nilai-nilai yang dipromosikan dan ingin diwujudkan ekonomi hijau adalah kesejahteraan bersama; peningkatan kualitas hidup; distribusi kesejahteraan yang adil dan setara; kesadaran akan keterbatasan daya dukung alam terhadap kehidupan manusia; serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi dan konsumsi. Semuanya ini diupayakan tidak hanya bagi keberlangsung lingkungan melainkan juga hak generasi mendatang atas kesejahteraan yang sama.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara “green economy” dan “green growth”. “pertumbuhan hijau” dipakai untuk melabeli kuantitas pertumbuhan ekonomi yang menjaga kelestarian lingkungan. Tekanan masih diletakan pada ekspansi kuantitas pertumbuhan ekonomi dengan mengakomodasi pertumbuhan populasi; mengurangi kemiskinan, dan menginspirasi pembangunan. Tetapi “ekonomi hijau” secara substantif memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekedar “pertumbuhan hijau”. Visi konservasi dan keberlanjutan sumber daya ekonomi dan alam lebih ditekankan dari pada sekedar pertumbuhan ekonomi. Karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia sangat terbatas. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, perlu memperhitungkan kebaikan bersama semua makhluk dan bahkan semua generasi. Pendekatan ini, yang terkadang disebut sebagai pertumbuhan hijau, bertujuan untuk menjauh dari model ekonomi tradisional yang sarat polusi dan menyebabkan penipisan sumber daya (Sepriano & Efitra e.d. 2024).

Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau

Khikmatova (2025) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip green economy mencakup tiga bidang utama dengan prinsip-prinsip sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Prinsip Green Economy

Bidang	Prinsip-prinsip
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan nilai dan capital alam • Model pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi • Internalisasi faktor-faktor eksternal dalam ekonomi • Mempromosikan efisiensi sumber daya dan energi • Menciptakan pekerjaan yang hijau dan layak
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem • Menginvestasikan sumber daya alam yang berkelanjutan • Menjaga dan tanggap terhadap kekayaan alam dan keterbatasan ekologis • Menerapkan international environmental sustainability goals (misalnya, MDG 7)
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi kemiskinan; mempromosikan well-being, melindungi kehidupan, proteksi sosial, dan membuka akses terhadap pelayanan-pelayanan pokok • Secara sosial inklusif, demokratis, partisipatoris, akuntabel, transparan, dan stabil • Setara, fair, dan adil – dalam dan antar negara serta antar generasi

Sumber : Khikmatova, 2025

Agar program ekonomi hijau berhasil, setiap negara perlu merumuskan secara detil prinsip-perinsip spesifik yang perlu diterapkan baik secara global, regional, lokal, maupun dalam lingkup perusahaan. Ini berarti bahwa keberhasilan pengembangan ekonomi hijau bergantung pada praktik ekonomi yang menjamin integrasi yang seimbang antara keuntungan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Jika dicermati lebih dalam, prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan lima (5) keutamaan ekonomi ekologis, yakni kebaikan bersama (*well-being*); kesetaraan (*equity*); menjaga kekayaan alam semesta (*planetary boundaries principle*); prinsip efisiensi dan kecukupan (*principle of efficiency and sufficiency*) dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip kebaikan bersama menuntut agar pengembangan ekonomi harus didasarkan pada upaya untuk menjamin gaya hidup damai, nyaman, dan harmoni dengan semua makhluk dan dengan semua orang dengan memperhitungkan kondisi-kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sementara prinsip kesetaraan (*equity*) menegaskan perlunya menyediakan kesempatan dan akses yang sama bagi semua lapisan ekonomi dan berbagai sektor; menjamin penggunaan sumber daya ekonomi dan ekologis secara bertanggungjawab sambil menjaga kelestariannya bagi generasi yang akan datang. Prinsip kekayaan alam semesta bertujuan membangun kesadaran bahwa kekayaan sumber alam dalam alam semesta ini selalu terbatas. Pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbatas dengan mengabaikan keseimbangan ekologis tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya tersebut melainkan juga mengancam perubahan iklim dan kesehatan masyarakat hari ini dan terutama generasi yang akan datang. Prinsip kesadaran akan keterbatasan kekayaan alam berusaha mencegah ketidakseimbangan proteksi demi nilai ekonomi semata dengan meningkatkan dan merestorasi keberagaman sistem alam hayati air, tanah, dan udara.

Sementara prinsip *efficiency* dan *sufficiency* mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang tersedia secara efisien untuk mencapai hasil seoptimal mungkin sambil meminimalisasi limbah dan dengan demikian mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menekankan transparansi, akuntabilitas, *rule of law*, partisipasi dan tanggungjawab negara serta semua warga negara. Ekonomi hijau menekankan tata kelola yang terbuka dan bertanggungjawab ekologis, ekonomi, dan sosial untuk mempromosikan kebaikan bersama masyarakat.

Maka berdasarkan lima (5) prinsip ini, semua negara dan masyarakat di dunia mengembangkan strategi nyata untuk menjamin pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana dan melindungi lingkungan. Prinsip ini membantu memelihara keseimbangan ekologis dan sosial yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip ini secara signifikan berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan sosial antar negara serta mengurangi kemiskinan global.

Mengapa diperlukan ekonomi hijau?

Makmun (2025) menguraikan beberapa alasan pentingnya ekonomi hijau, yaitu:

1. Alasan moral: masyarakat masa kini memiliki kewajiban moral untuk menyisakan sumber daya alam saat ini untuk generasi yang akan datang

agar generasi yang akan datang pun menikmati hak moral yang sama atas kekayaan lingkungan.

2. Alasan ekologis: kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung mengancam keberadaan dan fungsi ekosistem keanekaragaman hayati.
3. Alasan ekonomi: pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan bisa menghasilkan dampak non ekonomi terutama lingkungan yang menyertainya. Maksimalisasi keuntungan dan pemenuhan kebutuhan tidak boleh dicapai dengan memunculkan masalah lain seperti kerusakan lingkungan, dan keadilan bagi generasi yang akan mendatang. Persoalan lingkungan berkaitan dengan pasar global.

Ashkan dan Ehsan (2024) dalam *Green Economy: A Progression Towards Realizing Sustainable Development in the Realm of International Environmental Law*, menyatakan bahwa penegakan hukum internasional merupakan faktor penting untuk memastikan perwujudan ekonomi hijau demi pembangunan berkelanjutan. Karena perubahan iklim, hilangnya sumber daya alam, serta degradasi lingkungan bukan merupakan persoalan personal melainkan problem sosial yang perlu diatasi bersama. Proteksi lingkungan dengan menegakan hukum lingkungan internasional bukan merupakan pilihan kebijakan sebuah negara melainkan keharusan hukum internasional.

Pelatihan penerapan *green economy* pada PT CP menghasilkan dampak positif bagi para peserta baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, para peserta pelatihan memperlihatkan semangat dan antusiasme yang sangat besar. Ini menjadi modal dasar yang sangat positif bagi keberlangsungan perusahaan. Para peserta yang mengikuti pelatihan juga mengakui bahwa mereka sudah mendengar gagasan tentang ekonomi hijau sebelumnya dari berbagai media tetapi belum mencermatinya secara mendalam. Maka penyelenggaraan pelatihan ini dianggap sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi hijau.

Menurut pengakuan para peserta, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil memperluas wawasan dan meningkatkan kesadaran ekologis peserta serta pihak perusahaan mengenai konsep ekonomi hijau, meliputi pengertian, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai dasarnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan pemahaman tersebut penting karena ekonomi hijau menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan (UNEP, 2011). Setelah mengikuti kegiatan, peserta dan perusahaan menunjukkan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip green economy dalam aktivitas bisnis serta mulai mampu merumuskan langkah-langkah implementatif yang sesuai dengan karakteristik perusahaan (OECD, 2011).

Berdasarkan hasil diskusi dan sharing pengalaman bersama mitra, diketahui bahwa perusahaan menyadari pentingnya penerapan akuntansi hijau

sebagai instrumen yang mendukung pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan usaha. Akuntansi hijau tidak hanya berkontribusi pada peningkatan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan, tetapi juga membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya secara lebih transparan (Bebbington & Larrinaga, 2014). Lebih jauh lagi, mitra memahami bahwa penerapan ekonomi hijau dan akuntansi hijau memiliki manfaat yang lebih luas, yaitu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, menjaga keberlangsungan sumber daya alam, serta melindungi kualitas lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang (UNEP, 2011; OECD, 2011; Bebbington & Larrinaga, 2014).

Secara kuantitatif, hasil PKM ini memperlihatkan bahwa 87% peserta menyatakan bahwa topik tentang ekonomi hijau berguna bagi eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. 82% peserta berjanji untuk memperhatikan problem lingkungan dan kesestariannya dalam mempertimbangkan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam, proses produksi, dan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Bahkan 87% peserta mengakui bahwa sudah saatnya perusahaan membantu para petani atau UMKM pertanian untuk memproduksi produk pertanian yang lestari secara ekologis, khususnya tebu sebagai bahan dasar gula, agar aman dan sehat. Kebijakan dan program ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan untuk melaksanakan program ekonomi hijau secara tepat untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

PT CP perlu merumuskan praktik ekonomi hijaunya sendiri. Praktik *green economy* bukanlah pendekatan yang seragam bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat tertentu. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, regulasi yang semakin ketat, dan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan yang semakin intens, praktik *green economy* akan tetap menjadi bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Ekonomi hijau menyaratkan pembalikan paradigma ekonomi dari ekonomi eksploitatif ke ekonomi konservasi dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan tata kelola lingkungan; memprioritaskan daya tahan lingkungan yang terbatas. Pendekatan ini menjamin bahwa generasi sekarang dan yang akan datang dapat berkembang tanpa mengkompromikan integritas lingkungan. Intinya adalah bahwa ekonomi hijau mencari harmoni dan titik temu antara kemajuan ekonomi, kebaikan bersama masyarakat (*societal well-being*), dan kesehatan lingkungan. Paradigma ekonomi seperti ini meninggalkan model ekonomi tradisional yang menggadaikan keberlangsungan alam pada keuntungan material sesaat yang dapat diperoleh. Ekonomi yang sehat secara ekologis, dalam perspektif ekonomi hijau, memasukan aset alamiah seperti udara, air, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan-kebijakan seperti penggunaan tanah yang *sustainable*, keberlanjutan sumber daya, dan

mengadopsi energi terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dalam perusahaan tidak hanya memperhitungkan nilai kapital uang melainkan juga alam. Ekonomi hijau membutuhkan regulasi, hukum, dan insentif ekonomi yang tepat. Tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi dan konsumsi melainkan juga regulasi terkait pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bagi aktivitas ekonomi serta penegakan hukum. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan pendukung utama ekonomi hijau. Distribusi sumber daya dan pendapat yang adil; kesetaraan sosial, dan pendidikan lingkungan merupakan rangkaian regulasi yang perlu dicermati agar ekonomi hijau dapat terwujud. Maka ekonomi hijau baik secara konseptual maupun praktis perlu terus digaungkan tidak hanya bagi para ilmuwan sosial dan ekonomi melainkan terutama bagi para praktisi ekonomi. Pelatihan seperti ini perlu terus dikembangkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamowicz, M. (2022). Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals, . *Sustainability* 2022, 14, 5901. <https://doi.org/10.3390/su14105901>
- Aghnia, (2026). Integrasi Pendidikan Lingkungan dan Ekonomi Hijau Bentuk Generasi Peduli Bumi, artikel online. <https://pgsd.fip.unesa.ac.id/post/integrasi-pendidikan-lingkungan-dan-ekonomi-hijau-bentuk-generasi-peduli-bumi>
- Ashkan, J & Eshan, K. (2024). Green Economy: A Progression Towards Realizing Sustainable Development in the Reals of International Environmental Law. *MPRA Paper* No. 123078, 28 Dec. 2024. Diakses dari <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/123078/>
- Barbier, E. B. (2010). *A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery*. Cambridge University Press.
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and Sustainable Development: An Exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413.
- Jubaedah, D., Sa'adah, S. & Mulyati, D. (2022). Penerapan Produk Green Economy Pada Program Wirausaha Muda Berbasis Ramah Lingkungan Di MAN 2 Pangandaran, *Jurnal Abdimas Sang Buana*, Volume 3 No 2 November 2022, hlm. 76-83. <https://es.uin-antasari.ac.id/2024/07/pengabdian-masyarakat-tentang-ekonomi-hijau-kolaborasi-dengan-ugm/ANGANDARAN>
- Judijanto, L. & Al-Amin. (2025). Penerapan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Literatur Teoritis dan Empiris, *Journal of Community Dedication*, Vol. 5 No. 1 Februari 2025, hal., 52-60. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1007>
- Khikmatova, H. (2025). The Concept Of Green Economy, Its Essence, And Principles Of Development. *Science And Innovation, International Scientific Journal* Vol. 4 Iss. 9, 107-110, Sept. 2025. independent researcher at TSEU <https://doi.org/10.5281/zenodo.17211740>
- Makmun. (2025). Green Economy: Konsep, Impelentasi dan Peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 1-15. <https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>

- OECD. (2011). *Towards Green Growth*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan.
- Sepriano & Efitra e.d. (2024). *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siregar, S.N, Niron, E.S. & Pena, V.R. (2026). Program Integrasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maukeli Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur, ABDIKAN (Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi), Vol. 5 No. 1 (Februari 2026) 70-79. <https://journal.literasisains.id/index.php/abdikan/article/download/7725/2907>
- Triandini, N.A, Azarina, P., Satibi, I.F., (2026), The Green Economy Concept: A Guide for Future Economic Policy, Research, and Activity. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1 (2025) 67-85. <https://doi.org/10.14710/jdep.8.1.67-85>
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2012). *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank